

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang mengetengahkan topik yang relevan dengan penulisan ini, dengan tujuan sebagai bahan bacaan dan referensi, antara lain:

Penelitian pertama adalah jurnal yang berjudul “ **Perjanjian Internasional Tentang Perdagangan Bebas Dalam Kerangka *Trans Pacific Partnership (TPP)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*: Relevansinya Bagi Indonesia**” yang ditulis oleh Herman Gea dari Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini mengemukakan mengenai posisi Indonesia di dalam perjanjian perdagangan bebas RCEP. Indonesia telah tergabung menjadi anggota RCEP sejak tahun 2012 dimana RCEP ini adalah sebuah usulan dari Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011. Bagi Indonesia, RCEP merupakan proses lanjutan yang sangat terarah berdasarkan *ASEAN Economic Community (AEC) 2015* dan konsolidasi FTA ASEAN+6. Pembentukan RCEP sangat berpengaruh terhadap mata rantai pasokan serta ketergantungan ekonomi kawasan. Kesiapan dari industri nasional menjadi prioritas utama Indonesia sehingga manfaat RCEP dapat digunakan secara efektif bagi perekonomian Indonesia. Untuk mendukung perekonomian

Indonesia di dalam RCEP, Indonesia perlu untuk meningkatkan investasi baik dari luar maupun dalam negeri. Secara tidak langsung, RCEP juga akan memberikan kemudahan bagi negara anggotanya untuk mendapatkan bahan baku industri dengan cara yang lebih efisien. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat integrasi cukup tinggi dalam sektor elektronik dan memiliki keunggulan dalam sektor yang berbasis Sumber Daya Alam memiliki peluang untuk mengembangkan industri tersebut<sup>27</sup>.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaan nya terletak pada analisis relevansi perjanjian RCEP untuk kepentingan nasional Indonesia serta tantangan dan dampak positive apa saja yang akan didapatkan oleh Indonesia salah satu diantaranya adalah mempermudah proses ekspor bahan baku industri kepada negara anggota RCEP, mengingat Indonesia memiliki SDA yang berlimpah. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai sektor e-commerce dan hanya berfokus pada Indonesia saja.

Penelitian kedua adalah jurnal yang berjudul **“Motif dan Kepentingan Tiongkok dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)”** yang ditulis oleh Muhammad Ferdy Pratama dkk dari Universitas Sriwijaya, Palembang. Penelitian ini mengemukakan tentang motif Tiongkok dalam penerapan RCEP yang bertujuan untuk *Counter-Balance* serta sebagai citra baik Tiongkok

---

<sup>27</sup>GEA, H. (2018). Perjanjian Internasional Tentang Perdagangan Bebas Dalam Kerangka Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) : Relevansinya Bagi Indonesia (GEA, H, 2018, #) . 4-9.

terhadap negara Kawasan Asia Tenggara. Perjanjian RCEP dinilai dapat mengimbangi pengaruh Amerika terhadap Kawasan Asia Pasifik yang terimplementasikan melalui Trans Pacific *Partnership* (TPP). Pivot to Asia menjadi tindakan Amerika dalam mengambil hegemoni Kawasan dan melahirkan perubahan yang signifikan seperti TPP yang memiliki liberalisasi lebih komprehensif serta mencontoh aturan WTO dengan menerapkan standar yang tinggi. Selain itu, AS juga menambahkan anggota baru yakni Jepang, Kanada dan Mexico. Jepang yang pada saat itu memiliki konflik dengan Tiongkok mendapatkan undangan dari AS untuk bergabung dalam TPP. Melihat hal tersebut, Tiongkok mengambil sikap dengan *meng-counterbalance* hegemoni AS sebagai respon dari *Balance Of Power* yang telah diciptakan oleh negeri paman sam tersebut. Keputusan Tiongkok bergabung dalam RCEP memiliki harapan agar dapat menyaingi hegemoni AS di TPP, mengimbangi pasar Asia Timur dan menguatkan ekonomi Tiongkok dengan negara-negara Kawasan Asia. Jurnal ini memakai pendekatan Neorealisme yang merupakan turunan dari teori Realisme yang mementingkan Balance of Power namun tidak menutup kemungkinan terdapatnya kerjasama dalam organisasi internasional seperti yang terimplementasi dari perspektif Liberalisme. Dengan bergabungnya Tiongkok dalam RCEP, hal ini tentu dapat memberikan banyak dampak positif bagi ekonomi Tiongkok yang sedang mengalami perang dagang dengan AS.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pratama MF, dkk, Op.Cit. hal 8.

Dalam penelitian diatas, terdapat perbedaan serta persamaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada pembahasan motif Tiongkok untuk bergabung pada RCEP serta menguraikan beberapa keuntungan yang didapatkan Tiongkok dari FTA tersebut. Kemudian, penelitian ini juga melihat adanya *positive-sum game* yang didapatkan dari interdependensi antar negara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya pembahasan yang komprehensif mengenai working group of e-commerce (WGEC) yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi penulis serta tidak adanya pembahasan kerjasama antara Tiongkok dengan Indonesia.

Penelitian ketiga adalah jurnal yang berjudul “ **Analisis Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* pada Working Group E-Commerce** ” yang ditulis oleh Miranda Amalia Noviani dari Universitas Sriwijaya Indralaya. Penelitian ini mengemukakan bahwa ASEAN telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan mitranya di Kawasan Asia Timur melalui hubungan perdagangan di bidang ekonomi. RCEP merupakan inisiatif yang diperkenalkan ASEAN untuk menggabungkan 10 mitranya dalam perjanjian perdagangan bebas. Di dalam perundingan RCEP terdiri dari 9 Working Groups yang meliputi perdagangan jasa, perdagangan barang, kerja sama ekonomi, investasi, kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, persaingan, pengadaan barang, e-commerce, serta usaha kecil dan menengah. Selain itu RCEP mempunyai 5 Sub Working Group (SWGs) dibawah Working Group Perdagangan Barang, yaitu *SWG-Customs Procedures & Trade Facilitation, SWG Rules of Origin, SWG-Sanitary and*

*Phytosanitary Measures, SWG Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures STRACAP, dan SWG-Trade Remedies.* RCEP akan menciptakan perdagangan terbesar di dunia dengan dampak yang sangat besar khususnya bagi perekonomian dunia di kawasan Asia. Di tahun 2015 sendiri Komite Negosiasi Perdagangan dari RCEP telah menyetujui proposal untuk membentuk kelompok kerja tentang *e-commerce* yang dimana bertujuan untuk mem-formalisasi *e-commerce*. Indonesia saat ini juga tengah mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang sangat cepat terbukti dari banyaknya perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* dinilai lebih efisien karena dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya sehingga dalam beberapa tahun terakhir banyak bermunculan platform *e-commerce* di Indonesia<sup>29</sup>.

Pada penelitian diatas penulis melihat adanya persamaan yang membahas mengenai working group *e-commerce* secara umum. Namun, penelitian tersebut sama-sama memandang RCEP sebagai suatu gagasan yang dapat menguntungkan anggota-anggota yang tergabung di dalam RCEP khususnya dibidang investasi dan ekonomi karena dinilai dapat meningkatkan nilai pasokan kawasan dan global melalui lima sub working groups. Sedangkan perbedaannya terletak pada belum spesifik-nya penelitian ini membahas mengenai working group *e-commerce* di dalam RCEP khususnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok.

---

<sup>29</sup>Noviani, Ma. (2020). Analisis Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada Working Group E-Commerce

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Teori Kerjasama Internasional (*International Cooperation*)

Teori Kerjasama internasional telah lahir dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir sebagai landasan penelitian ilmu Hubungan Internasional. Banyak negara yang sudah mengimplementasikan kerja sama internasional jauh sebelum Thucydides membahas diplomasi, perjanjian, dan aliansi lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Namun studi ini masih tergolong muda. Teori Kerjasama internasional sendiri memiliki definisi yang bersifat umum baik dari segi aktor maupun isu. Tidak hanya antar individu yang dapat menjalin kerja sama, melainkan beberapa entitas kolektif diantaranya termasuk perusahaan, partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris, dan negara-bangsa.<sup>30</sup>

Meskipun perspektif *International Cooperation Theory (ICT)* sering mendefinisikan Kerja sama Internasional sebagai negara, namun *ICT* juga dapat melibatkan aktor lain seperti *intergovernmental organizations (IGO)* dan *nongovernmental organizations (NGO)*. *Thomas Schelling* merupakan pelopor pendekatan strategis dalam kerja sama internasional, *Thomas* menulis dalam kata pengantar bukunya yang berjudul "*The Strategy of Conflict*". "*I hoped to help establish an interdisciplinary field that had then been variously described as 'theory of bargaining,' 'theory of conflict,' or 'theory of strategy.'* The field that I hoped would

---

<sup>30</sup> Dai, X. Dkk. (2017). *International Cooperation Theory and International Institutions*. <https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-93>

*become established has continued to develop, but not explosively, and without acquiring a name of its own*”<sup>31</sup>

Menurut Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional“, suatu kerjasama internasional didefinisikan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.<sup>32</sup>

### **2.2.2 Teori Liberalisme Interdependensi**

Liberalisme Interdependensi merupakan varian liberalisme yang berasal dari kepercayaan bahwa manusia saling membutuhkan, oleh sebab itu manusia dan pemerintah saling membutuhkan satu sama lain. Logika saling membutuhkan ini menjadi pendorong berkembangnya sektor ekonomi. Progress dan kebahagiaan sebagaimana dikatakan oleh para liberalis klasik menjadi suatu hal yang ingin dicapai secara bersama dengan asas saling membutuhkan. Oleh karenanya kerjasama

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 33.

dipandang jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan cara kekerasan untuk mencapai kemajuan.

Liberalisme interdependen menjadi dasar dari kerjasama ekonomi dan menjadi pendorong berkembangnya kerjasama regional yang semakin terintegrasi. Saling membutuhkan ini pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang saling membutuhkan atau dikenal dengan istilah *complex interdependence*. Hubungan ini bukan semata-merta antar negara lagi tetapi meliputi hubungan berbagai aktor pada berbagai level dengan kepentingan yang berbeda<sup>33</sup>.

Liberalisme Interdependensi dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye di dalam buku *Power Interdependence* tahun 1977, konsep ini lahir seiring dengan hadirnya globalisasi yang kemudian menyadarkan negara bahwa militer bukanlah solusi untuk mencapai kepentingan negara seperti penyelesaian konflik, ekonomi, dan permasalahan sosial. Kerjasama Internasional lebih efektif dalam mencapai tujuan dan kepentingan-kepentingan negara.

Keberadaan kerjasama internasional untuk mencapai kepentingan nasional tidak dapat terwujud jika suatu negara tidak memiliki kepentingan yang sama dengan negara lain sehingga dampak dari keberadaan kerjasama ini juga akan menimbulkan kerugian terkait dengan kepentingan nasional negara tersebut. Era globalisasi yang dipenuhi kerjasama antar aktor telah menciptakan suatu kondisi saling ketergantungan

---

<sup>33</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *“Introduction International Relations Theories & Approaches”*, (Oxford, 2010): hal 96-98.



atau suatu interdependensi. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara saling membutuhkan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Interdependensi merupakan turunan dari liberalisme yang menjelaskan bahwa kerjasama yang saling bergantung satu sama lain akan memberikan keuntungan baik itu di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Interdependensi timbul karena negara memiliki kekurangan ditengah keunggulannya masing-masing. Kekurangan ini yang kemudian mendorong negara untuk bekerja sama baik secara bilateral atau multilateral yang berujung pada saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain<sup>34</sup>.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Respon ASEAN dalam dinamika ekonomi kawasan global berlandaskan pada pilar ke - 4 Cetak Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana ASEAN memprakarsai terbentuknya *The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dengan Tiongkok, Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. Pembentukan RCEP ini dilandasi oleh konsep filosofis dan strategic melalui kerjasama *Free Trade Agreement (FTA)* ASEAN bersama dengan mitra FTA yang dipercaya akan memberikan potensi ekonomi dari integrasi pasar dan kawasan ekonomi. Pembentukan kerjasama RCEP ini juga merupakan bentuk dari berlomba-lombanya organisasi Kawasan untuk membentuk kerjasama perdagangan atau ekonomi yang lebih sejalan dengan kebutuhan regionalnya.

---

<sup>34</sup> Waheeda Rana, Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts, Quaid-i i Azam University, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No.2; February 2015. Hlm. 291.

Terbentuknya RCEP akan berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap tatanan rantai pasokan dan tingkat ketergantungan ekonomi baik bagi negara RCEP ataupun non- RCEP. Manfaat ekonomi dari perjanjian ini yaitu secara timbal balik dengan memperluas dan memperdalam kerja sama di bidang ekonomi yang didasari oleh FTA yang telah berjalan pada saat ini. Pemberlakuan RCEP akan membuat terbukanya akses pasar yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Kesiapan industri nasional yang menghasilkan nilai tambah akan menjadi prioritas yang harus dilakukan Indonesia agar manfaat RCEP optimal bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mendorong investasi baik asing maupun dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produk Indonesia yang berdaya saing sehingga dapat memanfaatkan pasar di negara peserta RCEP yang dimana sangat menjanjikan bagi Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kerangka teoritis yang dianggap relevan untuk membahas mengenai working group e-commerce di dalam RCEP khususnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Adapun teori yang digunakan antara lain Teori Liberal Interdependensi untuk mengetahui ketergantungan perdagangan negara-negara ASEAN dengan mitranya di dalam RCEP khususnya dalam working group e-commerce serta Teori Kerjasama Internasional untuk memberikan perspektif kolaborasi di antara kedua negara.